

### **BAB III**

## **POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DAN PENJAJAHANNYA DI KOREA**

Memiliki kesamaan dalam hal kepercayaan Komfusianisme, memiliki kesamaan pada penulisan dan cara makan yang hampir sama antara Jepang dan Korea Selatan, namun memiliki beberapa kesamaan antara kedua negara tersebut tidak membuat hubungan kedua negara ini memiliki hubungan yang baik. Penjajahan Jepang di Korea Selatan memiliki efek yang besar dalam hubungan kedua negara tersebut di masa kini.

#### **A. Politik Luar Negeri Jepang Pada Masa Penjajahan Korea**

Awal mula masa modern di Jepang dibuka dengan masa Restorasi Meiji yang terjadi di tahun 1868 hingga 1912. Terjadinya Restorasi Meiji ini mempengaruhi Jepang untuk mencapai beberapa aspek yang selama berabad-abad yang telah dikembangkan oleh Barat dan Jepang mampu mengembangkannya dalam beberapa dekade. Jepang menciptakan negara yang modern dengan industri modern, institusi politik yang modern dan juga pola hidup masyarakat yang modern.<sup>1</sup>

Peningkatan ekonomi di Jepang terjadi ketika mendekati awal Perang Dunia pertama. Impor yang dilakukan Jepang melebihi ekspor dan penghematan ekonomi yang

---

<sup>1</sup> International Society for Education Information, Inc. 1996. *The Japan Of Today*. s.l., Japan Echo Inc. Hal 11.

dilakukan oleh Jepang benar-benar dirasakan. Bahkan untuk mengurangi pengeluaran Jepang mengurangi persenjataan angkatan laut.

Di awal tahun 1925, terjadi demonstrasi anti-Jepang yang disebabkan oleh penyerangan Jepang kepada pekerja tekstil di Shanghai yang menyebabkan banyak korban jiwa, sebagian polisi Inggris berusaha untuk menghentikan demonstrasi tersebut. Oleh karena itu, meskipun upaya Menteri Luar Negeri Jepang Shinihara berusaha untuk membatasi gangguan dari Jepang, namun opini publik China terus meradang karena tindakan Jepang.<sup>2</sup>

Jepang yang merasa bangsanya merupakan negara yang kuat secara militer yang telah dibuktikan dengan melakukan beberapa perang di negara lain ingin menguasai negara-negara yang ada di Asia, salah satunya adalah negara Korea. Untuk menguasai Korea, Jepang perlu bersaing dengan negara-negara lain yang sebelumnya telah menduduki Korea, seperti Amerika dan Rusia. Karena adanya saingan dengan negara lain mendorong Jepang ingin menguasai seluruh Korea. Keinginan Jepang untuk menguasai wilayah Semenanjung Korea ini ditentang oleh Rusia dan mengakibatkan terjadinya perang Rusia dengan Jepang selama satu tahun, yakni 1904-1905. Pada tahun 1905 Jepang melakukan Perjanjian Eulsa yang berisikan bahwa Jepang menjadikan Korea sebagai bagian dari Jepang sebagai wilayah penyangga negara Jepang.

Sebelumnya Jepang melakukan perang dengan Sino yang disebut perang Sino-Jepang pada tahun 1894-1895 yang berakhir dengan kemenangan Jepang dan mendapatkan

---

<sup>2</sup> Mikiso Hane. 1986. *Modern Japan A Historical Survey*. s.l., Westview Press. Hal 198-204.

konsekuensi adanya akuisisi Taiwan dari China ke Jepang.<sup>3</sup> Kemenangan Jepang atas China dan Rusia menjadikan Barat harus mempertimbangkan Jepang sebagai salah satu negara di Asia yang tangguh pada bidang politik dan militer, sehingga Jepang tidak dapat disamakan dengan negara-negara Asia lainnya.

Pada tahun 1910 Jepang mulai menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri di Korea. Semua aspek pada masyarakat Korea dikuasai oleh Jepang, bahkan Korea tidak memiliki kebebasan berpolitik, berbicara dan berkumpul.<sup>4</sup> Penjajahan Jepang di Korea ini berbeda dengan tujuan Jepang menjajah di negara lain, penjajahan Jepang di Korea dikarenakan posisi geografis Semenanjung Korea yang strategis, Jepang ingin menguasai Semenanjung Korea yang pada gilirannya nanti Jepang dapat menjadikan Semenanjung Korea sebagai bagian dari wilayah Jepang, serta memerintah Korea secara langsung dengan cara menguasai rakyat Korea dan memasukkan rakyat Korea dalam struktur masyarakat Jepang. Karena aspek geografis yang strategis pada Semenanjung Korea itulah yang membuat Jepang merubah tujuan penjajahan yang biasanya dengan tujuan eksploitasi ekonomi dan sosialis berubah menjadi ingin menguasai Korea sebagai bagian dari Jepang.<sup>5</sup>

Selama masa kependudukan Jepang di Korea, Jepang menguasai aspek ekonomi, politik dan militer bangsa Korea. Kebijakan Jepang di bidang kebudayaan dan pendidikan telah menghambat perkembangan kebudayaan bangsa dan menimbulkan perbedaan

---

<sup>3</sup> International Society for Education Information, Inc. 1996. *The Japan Of Today*. s.l., Japan Echo Inc. Hal 11.

<sup>4</sup> Mikiso Hane. 1986. *Modern Japan A Historical Survey*. s.l., Westview Press. Hal 198-206.

<sup>5</sup> Yang Seung Yoon dan Mochtar Mas'oeed. 2007. *Politik, Ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-pokok Kepentingan dan Permasalahan*. s.l. : Gadjah Mada University Press. Hal 20.

ideologi antara kelas elit korea. Kebijakan Korea untuk mengontrol bidang politik telah memacu timbulnya perpecahan internal di kalangan pejuang kemerdekaan Korea.<sup>6</sup>

Biro Agraria yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1910 yang digunakan untuk merampas tanah masyarakat Korea secara efektif, dimana perampasan tanah Korea dimulai sebelum menjajah Korea. Pemahaman mengenai kepemilikan, sistem tanah, dan produktifitasnya sangat penting untuk menetapkan pajak tanah yang rasional. Secara perlahan banyak dari masyarakat Korea yang telah kehilangan tanah mereka yang diwariskan oleh nenek moyang mereka karena keserakahan Jepang yang ingin menguasai tanah Korea, sebagian besar petani Korea yang telah dirampas tanahnya oleh Jepang terpaksa menjadi buruh, kuli atau pengembara.

Pasar Korea juga dikuasai oleh Jepang, dimana barang-barangnya didominasi oleh produk Jepang untuk membatasi perkembangan industri Korea. Barang-barang manufaktur juga mulai didatangkan ke Korea secara besar-besaran dan mulai mengikis industri kerajinan Korea. Masyarakat Jepang di Korea menjadi semakin makmur dengan menjadi pemilik tanah, pedagang dan rentenir, namun berbeda dengan masyarakat Korea yang menjadi semakin miskin.<sup>7</sup>

Jepang juga tidak memperbolehkan masyarakat Korea berbahasa Korea, mereka hanya mengizinkan masyarakat Korea untuk berbahasa Jepang. Selain itu Jepang juga

---

<sup>6</sup> Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati. 2003. *Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. s.l. : Gadjah Mada University Press. Hal 137.

<sup>7</sup> Mikiso Hane. 1986. *Modern Japan A Historical Survey*. s.l. : Westview Press. Hal 205.

mengatur kurikulum sekolah serta mendidik bangsa Korea mengenai kebudayaan, bahasa dan adat istiadat Jepang agar masyarakat Korea dapat tumbuh sesuai dengan keinginan Jepang yang ingin menciptakan tenaga kerja yang terpelajar yang dapat membantu pembangunan ekonomi di masa yang mendatang.

Jepang juga menghancurkan dan memusnahkan sejarah dan kebudayaan Korea secara total dan berusaha menancapkan kebudayaan dan jiwa bangsa Jepang secara total ke dalam kehidupan masyarakat Korea. Seluruh buku-buku pelajaran yang disusun oleh bangsa Korea ditarik dan dimusnahkan, sebagai gantinya Jepang memberikan buku baru dengan isi yang sesuai dengan kebijakan Jepang yang juga melarang penggunaan tulisan Korea.<sup>8</sup>

Berbagai hal yang dilakukan Jepang terhadap Korea tersebut mampu menghancurkan Korea, namun karena Jepang ingin menciptakan kesan bahwa Jepang bukanlah menjajah bangsa Korea, yaitu dengan diijinkannya masyarakat Korea memperoleh pendidikan dan memasukkan masyarakat Korea ke dalam struktur masyarakat Jepang. Kemudian Jepang juga membangun proyek *infra structure* yang mulai dikerjakan dengan pemasangan rel kereta api, pembangunan stasiun pembangkit tenaga listrik, fasilitas pelabuhan, jalan raya dan sebagainya.<sup>9</sup> Meskipun demikian, Korea tetap berusaha untuk melepaskan diri dari jajahan Jepang yang kemudian timbullah peristiwa 1 Maret 1919.

---

<sup>8</sup> Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati. 2003. *Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. s.l. : Gadjah Mada University Press. Hal 137.

<sup>9</sup> Yang Seung Yoon dan Mochtar Mas'oe'd. 2007. *Politik, Ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-pokok Kepentingan dan Permasalahan*. s.l. : Gadjah Mada University Press. Hal 25.

Dalam gerakan Kemerdekaan 1 Maret, kaum pelajar, buruh dan petani memainkan peranan penting dalam terlaksananya gerakan kemerdekaan tersebut secara nasional. Gerakan Kemerdekaan 1 Maret tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan.<sup>10</sup> Gerakan Kemerdekaan 1 Maret tersebut dilakukan selama satu bulan drngsn sekitar 2 juta orang yang melakukan 1.500 kali demonstrasi anti imperialis Jepang di 211 kabupaten dalam negeri. Pergerakan ini mencerminkan semangat dan tekad kuat bangsa Korea untuk meraih kemerdekaan.<sup>11</sup>

Meskipun Gerakan Kemerdekaan 1 Maret gagal memperoleh keberhasilan akibat tekanan dari Jepang baik dalam negeri maupun di luar negeri, namun gerakan tersebut berhasil memperlihatkan tekad kuat bangsa Korea untuk meraih kemerdekaan. Meskipun gagal, Gerakan Kemerdekaan 1 Maret ini mampu mempersatukan gerakan kemerdekaan secara efisien dan menjadi contoh yang baik bagi gerakan Kemerdekaan bangsa Korea berikutnya.<sup>12</sup>

Selain invasi yang dilakukan oleh Jepang untuk menguasai Korea dalam berbagai bidang. Pada akhirnya Jepang menjadi negara penjajah dan mulai menguasai daerah Asia Timur dan Tenggara. Jepang juga memanfaatkan wanita-wanita dari beberapa negara untuk dijadikan budak nafsu oleh para tentara Jepang ketika terjadinya Perang Dunia II. Adanya

---

<sup>10</sup> Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati. 2003. *Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. s.l. : Gadjah Mada University Press. Hal 160.

<sup>11</sup> Radio Korea Internasional, KBS dan National Institute for International Education Development, Ministry of Education of Korea. 1995. *Sejarah Korea*. Seoul : Jung Moon Printing Co., Ltd. Hal 188.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Jugun Ianfu ini tidak hanya terjadi di Korea saja, namun juga ada di beberapa negara lain seperti Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.<sup>13</sup>

Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang kalah dari Sekutu, maka Jepang harus memberikan Korea, dimana kemudian dampak dari perintah untuk membagi dua wilayah antara utara dan selatan dikemudian hari menjadi Korea Selatan dan Korea Utara dengan memiliki paham yang berbeda antara kedua negara tersebut. Padahal isi dari *Cairo Declaration* sesungguhnya ialah Jepang melepaskan Korea dan menjadi negara yang bebas bukannya dibagi kepada dua negara lainnya dan juga Jepang melepaskan Taiwan dan Manchuria.

Setelah kalah pada Perang Dunia II yang kemudian membawa kerugian yang cukup besar bagi Jepang. Pada saat tersebut Jepang berada di bawah kekuasaan Amerika yang diwakili oleh Jendral Douglas McArthur yang member reformasi bagi Jepang baik di bidang sosial maupun ekonomi. Lahan pertanian diciptakan untuk mendukung para pekerja yang yakin akan hak-hak mereka akan terpenuhi. Perempuan diberikan kebebasan untuk memilih dan hak-hak lainnya. Kebebasan berserikat, berbicara dan beragama juga diberikan. Kemudian pada 1947 konstitusi liberalism berlaku di Jepang.<sup>14</sup>

Di tahun 1951 Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian *San Francisco* dengan Amerika yang berisikan tentang pertanggungjawaban Jepang yang harus membayar

---

<sup>13</sup> A Memoir of Jugun Ianfu. [Online][Cited: 2015 February 14. ][newkatawaktu.wordpress.com/2012/09/14/492/](http://newkatawaktu.wordpress.com/2012/09/14/492/).

<sup>14</sup> International Society for Education Information, Inc. 1996. *The Japan Of Today*. s.l. : Japan Echo Inc. Hal 12.

kerugian perang kepada sekutu, kepulauan Jepang yang berada di bawah pengawasan Amerika, tokoh-tokoh penjahat perang akan diadili dan dihukum dibawah pengawasan internasional dan kepulauan Kurile dan Sakhalin diberikan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada China (Tiongkok). Karena perjanjian tersebut Jepang memiliki kembali haknya untuk dapat melakukan hubungan dengan negara-negara asing yang telah ikut dalam perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

Jepang kemudian berpindah prinsip haluan yang sebelum Perang Dunia II ialah *Fukoku Kyohei* (Negara kuat, militer kuat) kemudian setelah Perang Dunia II menjadi *Fukoku Kenzai* (Negara kuat, ekonomi kuat). Sejak saat itulah Jepang berusaha membangkitkan negaranya dengan menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain, meskipun mengalami masa pasang surut dan terjadinya ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Dipertengahan tahun 1960-an Jepang mulai memiliki ekonomi yang kuat untuk mulai berkompetisi pasar terbuka di dunia. Hal ini dikarenakan Jepang mendapatkan dukungan dari Amerika dan negara lain untuk memperbaiki keadaan ekonominya, kemudian Jepang juga masuk dalam beberapa organisasi internasional dan ikut berpartisipasi dalam hubungan multilateral.

Setelah dua dekade tidak memiliki hubungan bilateral pasca penjajahan Jepang di Korea, kemudian pada tahun 1965 Jepang mulai membuka hubungan dengan Korea. Kebangkitan ekonomi yang pesat di tahun 1970an yang dibarengi dengan meningkatnya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

perekonomian internasional yang kemudian membuat Jepang merubah pola pikir dan juga pola hidup masyarakatnya. Pada saat tersebut Jepang dengan konsisten melakukan diplomasi ekonomi dengan cara menjadi mitra dagang dengan negara-negara maju maupun negara berkembang.

Jepang yang memainkan peran penting dalam pergerakan pasar, keuangan, ekonomi dan teknologi. Kemudian di 1975 Jepang menjadi anggota dari G7 yang pernah dilaksanakan di Tokyo pada tahun 1979 dan 1986. Meningkatnya kekuatan nasional Jepang dan meningkatnya harapan dari negara lain terhadap peran Jepang, pemerintah di pertengahan tahun 1980-an Jepang telah mengambil sikap positif untuk memperluas kontribusi Jepang di masyarakat global<sup>16</sup>

## **B. Hubungan Bilateral Korea Selatan dengan Jepang Pasca Penjajahan**

Hubungan bilateral antar Korea Selatan dengan Jepang hingga saat ini berjalan pada umumnya sangat memuaskan meskipun banyak masalah-masalah yang terjadi selama hubungan antara kedua negara tersebut berlangsung. Di tahun 1951-1965 terjadi masa negoisasi normalisasi hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang, hal tersebut dikarenakan Korea merasa masa tersebut ialah waktu yang tepat untuk membahas permasalahan antara kedua negara karena Jepang masih berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat melalu *Supreme Command of the Allied Power*. Pada pertemuan pertama di tahun 1951 dalam perundingan tersebut isu utama yang dibicarakan ialah hal-hal yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

berkaitan dengan akibat dari penjajahan Jepang terhadap Korea, seperti tuntutan Korea Selatan terhadap kompensasi atas kehancuran ekonomi yang terjadi selama penjajahan Jepang dan pengembalian buku dan dokumen kuno serta aset-aset seni budaya lain yang dirampas oleh Jepang pada akhir Perang Dunia 2. Sedangkan Jepang membahas tentang isu perjanjian perairan dan perikanan yang diharapkan dapat mengurangi batas perairan Korea yang telah ditetapkan oleh presiden Rhee Syngman atas nama Garis Batas Perdamaian.

Namun perundingan ini tidak berjalan secara lancar karena Jepang tidak mau menyetujui tuntutan yang diajukan oleh Korea dan Jepang justru lebih menginginkan agar Korea Selatan dan Jepang terlebih dulu menandatangani perjanjian normalisasi hubungan antara kedua negara sebelum membahas tentang tuntutan tersebut. Kemudian di pertemuan tahun 1953 Jepang kembali meolak untuk memberikan kompensasi kepada Korea akibat penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, Jepang menolak karena merasa selama penjajahan Jepang di Korea, Jepang juga ikut membantu untuk meremajakan hutan, pembangunan jalan kereta api dan memberikan banyak keuntungan bagi Korea Selatan. Karena alasan yang diberikan oleh Jepang tersebut membuat kemarahan rakyat Korea hingga membuat Korea Selatan segera menarik delegasinya dan menuntut permintaan maaf yang resmi dari Jepang.

Setelah mengalami kebekuan hubungan antara Korea dengan Jepang selama 4 tahun. Kemudian di tahun 1957 perundingan kembali diadakan setelah Jepang menarik kembali pernyataannya tersebut. Di perundingan ini mengalami sedikit kemajuan dimana

Jepang mau mengembalikan aset-aset seni budaya Korea yang sebelumnya pernah dirampas oleh Jepang dan Korea mau mengembalikan nelayan Jepang yang ditangkap oleh Korea karena melanggar Garis Batas Perdamaian. Namun kemarahan Korea muncul lagi ketika Jepang ingin mengembalikan masyarakat Korea yang berada di Jepang ke Korea Utara.

Di tahun 1960, di perundingan tersebut membahas mengenai isu klaim kepemilikan. Di masa pemerintahan Presiden Park Chung Hee hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang kembali meningkat dimana Korea Selatan memandang Jepang sebagai negara yang dapat diandalkan sebagai sumber bantuan ekonomi untuk membantu Korea Selatan memperluas hubungan ekonomi internasional dan melaksanakan pembangunan nasional. Di pemerintahan Presiden Park, Korea Selatan dengan Jepang berhasil mencapai beberapa kesepakatan diantaranya mengenai isu klaim kepemilikan, masalah perairan dan perikanan dan sebagainya.

Setelah mencapai beberapa kesepakatan, Korea Selatan dengan Jepang merasa perlu untuk merundingkan persetujuan dasar hubungan yang mencakup masalah-masalah penting seperti penguasaan Korea Selatan atas Semenanjung Korea dan pencabutan persetujuan – persetujuan lama yang pernah disepakati oleh kedua negara di masa sebelumnya. Tuntutan Korea Selatan agar Jepang bersedia mengakui Korea Selatan sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di Semenanjung Korea. Akhirnya Jepang menyetujui dan mengakui tentang hal yang telah ditetapkan oleh PBB mengenai Republik Korea. Namun, Jepang

tidak mau meminta maaf secara resmi melalui pernyataan-pernyataan kepada Korea Selatan mengenai penyesalan Jepang atas penjajahan yang telah mereka lakukan.

Kemajuan hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang ini mendapat tantangan dari rakyat di kedua negara yang menentang pembukaan hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang. Di Korea Selatan rakyat menentang hubungan Korea Selatan dengan Jepang karena alasan nasionalisme. Sedangkan rakyat Jepang menentang hubungan kedua negara ialah karena dengan adanya hubungan diplomatik dengan Korea Selatan akan mempengaruhi hubungan Jepang dengan Korea Utara, yang mana di Jepang setelah adanya kemerdekaan Korea di tahun 1945 membuat organisasi pro-Korea Utara (*Chochongnyong*) dan pro-Korea Selatan (*Mindan*). Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di Korea Selatan yang menentang hubungan kedua negara tersebut membuat presiden Park membuat undang-undang darurat dan mengeluarkan aktivis mahasiswa dari universitas.

Setelah mencapai normalisasi hubungan pemerintah Jepang mulai menyediakan bantuan untuk membantu ekonomi Korea Selatan. Politik luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama, bantuan ekonomi Jepang sangat dibutuhkan oleh Korea Selatan karena dengan bantuan tersebut Korea Selatan dapat melaksanakan rencana pembangunan ekonomi. Kedua, dengan adanya hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan akan menghapus pengaruh Korea Utara di Jepang dan juga organisasi Korea Utara di Jepang. Untuk memperkuat dukungan terhadap organisasi pro-Korea Selatan di Jepang, maka pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan dan

menyediakan pinjaman dalam jumlah besar dengan bunga lunak bagi masyarakat Korea di Jepang untuk menarik dukungan terhadap Korea Utara. Korea Selatan juga melakukan tindakan besar dengan mendatangkan organisasi pro-Korea Utara ke Korea Selatan untuk mengunjungi keluarga maupun makam leluhur mereka yang berada di Korea Selatan, yang kemudian beberapa anggota dari organisasi tersebut akhirnya beralih lebih memihak kepada Korea Selatan.

Untuk mendapatkan bantuan pasukan Amerika Serikat di Okinawa Jepang, terlebih dahulu Korea Selatan harus mendekati Jepang karena dengan persetujuan Jepang maka Amerika Serikat akan mau membantu Korea Selatan menggunakan fasilitas-fasilitas militer dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang. Faktor lain selain politik luar negeri Korea Selatan dengan Jepang ialah masalah perdagangan. Meskipun demikian Jepang tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara di bidang perdagangan, dimana Jepang dan Korea Utara memiliki kantor perwakilan perdagangan Korea Utara – Jepang di Beijing China di tingkat non-pemerintahan. Kelompok kiri dan asosiasi kalangan pengusaha Jepang membuat asosiasi perdagangan Korea Utara-Jepang. Pemerintah Jepang cenderung meningkatkan hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan dan hubungan Jepang dengan Korea Utara lebih dipimpin oleh kelompok kiri.

Hubungan perdagangan antara Jepang dengan Korea Selatan mengalami peningkatan yang sangat pesat karena Jepang lebih mempertahankan Korea Selatan sebagai mitra bisnis karena adanya Semenanjung Korea yang memiliki lokasi yang strategis. Selain

itu meningkatnya hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan ialah dengan adanya Korea Selatan, maka Jepang dan Korea Selatan akan mampu membendung meluasnya pengaruh komunis di Asia Timur. Akhirnya Jepang lebih memihak dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan Korea Selatan, karena Jepang menganggap Korea Selatan lebih menjaga keamanan dan perdamaian di Jepang. Dengan meningkatnya hubungan kedua negara tersebut maka diadakan konferensi tingkat menteri Jepang-Korea yang diadakan secara rutin setiap tahunnya dan dibentuknya Komite Kerjasama Korea-Jepang yang beranggotakan pemimpin politik dan ahli bidang ekonomi dan kebudayaan. Di tingkat swasta komite kerjasama ini dipimpin oleh kalangan pengusaha dari kedua negara. Meningkatnya hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang ini berbeda dengan hubungan yang terjadi antara Jepang dengan Korea Utara yang semakin merenggang yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya perdagangan antara kedua negara tersebut.

Kemudian konferensi tingkat menteri diadakan kembali, dalam konferensi ini Jepang menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan ekonomi kepada Korea Selatan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Jepang ingin mempertahankan stabilitas hubungan dengan Semenanjung Korea dan mulai meningkatkan hubungan dengan Korea Utara. Upaya Korea Utara untuk mewujudkan unifikasi antar Korea membuat Korea Selatan mendorong Jepang dan dibentuklah mobilisasi dukungan, yaitu Asosiasi Persahabatan Korea-Jepang dan Liga Parlemerter Korea-Jepang.

Memasuki tahun 1980-an, hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang mengalami peningkatan yang signifikan dengan tetap menjaga hubungan kerjasama yang memuaskan di segala bidang dan Korea Selatan mulai menjadi pesaing Jepang dalam hal teknologi. Namun, di tahun 1981 Korea Selatan mulai emosi dengan sikap Jepang yang menyembunyikan kebenaran dan berbagai fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan bangsa Korea di buku-buku pelajaran sejarah di Jepang. Kemudian di tahun 1983 konflik tersebut mulai mereda ketika Perdana Menteri Jepang, Nakasone berkunjung ke Seoul dan juga menyetujui pinjaman Korea kepada Jepang dalam rangka kerjasama ekonomi sebanyak 4 milyar dollar.

Di tahun 1990-an pemalsuan buku sejarah Jepang masih sering terjadi dan isu terpentingnya ialah ketika dimana wanita muda Korea dikirim ke Perang Pasifik untuk menghibur pasukan Jepang yang sama sekali tidak tercatat dalam buku sejarah tersebut. Pada pemerintahan Kim Young Sam di tahun 1993, pemerintah Jepang mengakui tentang yang Jepang lakukan terhadap wanita-wanita Korea dan memberikan ganti rugi kepada pada korban maupun keluarganya. Dan untuk memperingati hubungan kerjasama Korea Selatan-Jepang selama 30 tahun, kedua negara tersebut menyepakati untuk membuka sejarah hubungan kedua negara tersebut. Namun di tahun 1997 sebagian politikus Jepang mengumumkan pemalsuan sejarah Korea dan permasalahan tentang Pulau Dokdo. Hal ini membuat kedua negara tersebut menjadi beku kembali.

Presiden Kim Dae Jung di tahun 1998 mengeluarkan kebijakan untuk bekerjasama di masa depan untuk mengatasi permasalahan di masa lampau antara Korea-Jepang. Sebagai bukti dari tujuan pemerintahan Kim Dae Jung ini, ia membuka pintu Korea Selatan terhadap kebudayaan Jepang dan di tengah kunjungannya ke Jepang di tahun 1998 Presiden Kim menandatangani *Deklarasi untuk jalinan bersama antara Korea Selatan-Jepang*. dengan adanya deklarasi tersebut tidak hanya meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang kebudayaan saja namun juga membuka kerjasama dalam bidang olahraga yang dibukikan dengan menyelenggarakan secara bersama Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang.<sup>17</sup>

Hampir 50 tahun setelah lepas dari kependudukan Jepang, pemerintah Korea menerapkan larangan masuknya budaya Jepang ke Korea, seperti impor musik, film, ataupun berbagai hal yang berhubungan dengan Jepang. Hal ini dikarenakan masih adanya rasa sentimen selama pemerintahan Jepang yang terjadi selama 35 tahun. Kemudian di tahun 1998 pemerintah Korea Selatan mencabut larangan impor terhadap produk Jepang dan mulai dari situlah pengaruh Jepang muncul di Korea. Korea dianggap tertinggal dari bangsa lain yang telah terlebih dulu menerima pengaruh Jepang dengan budaya maupun J-Pop nya.

Sejak diperbolehkan masuknya berbagai produk impor Jepang banyak aspek-aspek di Korea, seperti film, musik, fashion dan sebagainya dipengaruhi oleh produk-produk

---

<sup>17</sup> Yang Seung-Yoon and Mochtar Mas'ood. 2004. *Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*. s.l. : Gadjah Mada University Press.

Jepang. Kaum muda Korea pun juga mulai menerima hal-hal yang berkaitan dengan Jepang, seperti mereka lebih menyukai musik-musik Jepang dibandingkan musik-musik penyanyi dari Korea, sehingga di toko-toko kaset lebih mendominasi album Jepang dibandingkan Korea. Game-game Jepang pun juga mulai digandrungi oleh pemuda-pemuda Korea. Namun, dari berbagai hal yang dimiliki Jepang yang sedang berkembang di Korea tidak merubah pemikiran dari masyarakat tua di Korea Selatan yang masih mengingat pahitnya penjajahan Jepang di Korea.

Namun, saat ini dominasi Jepang di Korea menjadi kebalikannya, yaitu dominasi Korea terhadap Jepang. Dimana Korea Selatan telah mampu menciptakan budaya mereka sendiri yang sekarang mampu menjadi tuan rumah bagi kebudayaan mereka sendiri dan berhasil membuat negara-negara tetangganya terpengaruh oleh budaya pop Korea, tak terkecuali dengan Jepang.

Seperti yang dijelaskan jika pemerintah Korea Selatan telah menjadikan Korean Wave sebagai alat diplomasi sejak tahun 2005. Hal tersebut dijelaskan dalam kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Korea Selatan dari tahun 2005 dalam upaya membangun citra positif Korean Wave. Hal ini juga didukung dengan ikut bergabungnya *Ministry of Foreign Affairs and Trade* dalam kegiatan diplomasi Korea Selatan melalui Korean Wave dalam hal meningkatkan kegiatan budaya dan mempromosikan Korean Wave untuk meningkatkan citra nasional sebagai negara yang terkemuka dalam bidang kebudayaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ministry of Foreign Affairs and Trade. 2006. *2006 Diplomatic White Paper*. Seoul : Ministry of Foreign Affairs and Trade ROK. Hal 147.

Selanjutnya dijelaskan dalam *Principal Goals and Direction of Korean Cultural Diplomacy* di tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Korea Selatan akan mendorong negara-negara lainnya dengan melakukan pertukaran budaya sebagai langkah awal untuk mendorong adanya kerjasama antar negara yang dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya pertukaran budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian dapat memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan citra nasional.<sup>19</sup>

Hubungan bilateral antara Korea Selatan dengan Jepang diawali dari *Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea* yang disahkan pada bulan Juni 1965. Melalui *Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea*, Korea Selatan dengan Jepang melakukan pembicaraan bilateral sejak tahun 1951 hingga 1945 yang selama rentang tahun tersebut Korea dengan Jepang melakukan pertemuan selama 7 kali. Melalui perjanjian ini pula, kedua negara menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi sebelumnya di tahun 1910 dinyatakan batal dan tidak sah.

Saat ini meskipun hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang masih dalam masa *love-hate relations* karena kedua Negara masih memiliki isu yang cukup sensitif, mengenai Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima dan penjajahan Jepang di masa lalu terhadap Korea Selatan, namun hubungan bilateral Korea Selatan dengan Jepang melalui bidang kebudayaan melalui *Hallyu* diharapkan berjalan dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Ministry of Foreign Affairs. 2007. *Principal Goals and Direction of Korean Cultural Diplomacy*. [Online] May 11, 2007. [Cited: March 16, 2015.] [www.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp?typeID=12&boardid=313&seqno=298757](http://www.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp?typeID=12&boardid=313&seqno=298757).

organisasi Korea, KTO (*Korean Tourism Organization*) dan KOFICE (*Korean Foundation For International Cultural Exchange*) dimana kedua organisai tersebut berusaha agar Jepang lebih membuka diri terhadap konten-konten maupun produk-produk dari Korea Selatan dan di harapkan mampu meredam masalah antara kedua negara karena Pulau Dokdo.